PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT MANAJEMEN BISNIS NUSANTARA

Nomor: 237.

- - 1. Nyonya RAFIKA RAHIM, lahir di Jakarta, tanggal 510-1992 (lima Oktober seribu sembilan ratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia,
 Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
 Jalan Kramat Lontar VII, Rukun Tetangga 005,
 Rukun Warga 001, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171044510920001;------
 - 2. Nona BALQIS AYU MEDITA, lahir di Tangerang,

tanggal 2-12-1998 (dua Desember seribu sembilan ratus sembilanpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Pondok Makmur Blok C.6 Nomor 6, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671084212980001;------

3. Tuan YUDI IRAWAN, lahir di Jogyakarta, tanggal 3-(tiga Januari seribu sembilan 1-1968 enampuluh delapan), Warqa Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perum Mabad I, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174090301680005;-----

- ----- Pasal 1 ------- 1. Perseroan terbatas ini bernama:
 - ----- PT MANAJEMEN BISNIS NUSANTARA ----
 (selanjutnya disingkat dengan "Perseroan"), -----
 berkedudukan di Jakarta Pusat.-----
- 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau Kantor -perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ---Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan -----

	oleh	Direksi	dengan	persetujua	n darı	Dewan
	Komisa	aris				
		JANGKA	WAKTU BER	DIRINYA PERS	EROAN	
			Pa	sal 2		
Per	seroar	n didirika:	n untuk j	angka waktu	yang tidak	
ter	batas	lamanya				
		MAKSUD DA	N TUJUAN	SERTA KEGIAT	AN USAHA	
			Pas	al 3		

- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
 berikut: -------
 - 70209 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA; --Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa--usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah---agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, ----rancangan dari metode dan prosedur----akuntansi, program akuntansi biaya, ----prosedur pengawasan anggaran belanja,---pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam----perencanaan, pengorganisasian, efisiensi

dan	pengawasan,	informasi	manajemen	dan
lain	-lain			

- 74902 AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS; -----Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan----penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lainlain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat. -----
- 82110 AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA
 ADMINISTRASI KANTOR;-----
 Kelompok ini mencakup penyediaan gabungan
 jasa administrasi perkantoran seharihari, seperti penerimaan tamu,----
 perencanaan keuangan, pemeliharaan----catatan dan tagihan rekening, jasa-----personalia dan surat menyurat.-----
- 77400 SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA; ------ Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk,

seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, ----pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik aset non finansial dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. kegiatan yang dicakup----meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) aset non finansial yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, brand name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian----franchise/waralaba dan aset non finansial yang tak berwujud lainnya. -----

----- M O D A L ------ Pasal 4 -----

- 1. Modal dasar perseroan adalah Rp. 50.000.000, ----(limapuluh juta rupiah), terbagi atas 100 (seratus)
 lembar saham, masing-masing Saham bernilai nominal
 Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah).------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah --- saham atas nama. ------

2.Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham-
hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum-
Indonesia
3.Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham
4.Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh
Perseroan
5.Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap
saham diberi sehelai surat saham
6.Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti-
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham
7.Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
a. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat saham;
c. Nilai nominal saham;
d. Tanggal pengeluaran surat saham
8.Pada surat kolektif saham sekurangnya harus
dicantumkan:
a. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat kolektif saham;
c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
d. Nilai nominal saham;
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
9.Surat saham dan surat kolektif saham harus
ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris
Utama
PENGGANTI SURAT SAHAM
PASAL 6
1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi

mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat

saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut

- diserahkan kembali kepada Direksi.-----
- 2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
- 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat Saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. ------
- 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. ------
- 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
- 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat --(2),ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis
 berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham
 pengganti.-----

- 2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
- 3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan

perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang
Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 8
1.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut
RUPS adalah:
a.RUPS tahunan;
b.RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut
juga RUPS luar biasa
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa,
kecuali dengan tegas ditentukan lain
3.Dalam RUPS tahunan:
a.Direksi menyampaikan:
-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
-laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -
b.Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan
mempunyai saldo laba yang positif
c.Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan -
ketentuan anggaran dasar
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5.RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat-

-	yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,
(dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
S	serta Anggaran Dasar
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 9
1.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya
	disebut RUPS adalah:
	a.RUPS Tahunan;
	b.RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini
	disebut juga RUPS luar biasa;
2.	Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
	keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luan
	biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain
3.	Dalam RUPS tahunan:
	a.Direksi menyampaikan:
	i. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewar
	Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
	ii. Laporan keuangan untuk mendapat pengesahar
	rapat;
	b.Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan
	mempunyai saldo labayang positif
	c.Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang
	telah diajukan sebagaimana mestinya dengan
	memperhatikan ketentuan anggaran dasar
4.	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan
	laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti
	memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawak
	sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewar
	Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
	telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
	sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
	Tahunan dan Laporan Keuangan
5.	RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu
	Waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dar

	memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara
	rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan
	huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang
	undangan serta Anggaran Dasar
	TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS
	Pasal 10
	RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau
_ •	di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha
0	
2.	RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
	terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan
	surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat
	kabar
3.	Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat
	belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan
	tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
	tanggal RUPS diadakan
4.	RUPS dipimpin oleh Direktur Utama
5.	Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan
	karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan
	kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil
	Direktur Utama
6.	Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau
	berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh
	salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh
	Direktur Utama atau wakil Direktur Utama
7.	Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan
	karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan
	kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah
	seorang anggota Dewan Komisaris
8.	Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir
	atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak
	diperlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS
	dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan

diantara mereka yang hadir dalam rapat. --------- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS --------- Pasal 11 ------

- 2. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap --tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ----jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. ------
- 3. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan ----musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara --setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ---RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. ---
- 4. Setiap pemegang saham dapat berpartisipasi dalam RUPS melalui video konferensi atau melalui alat komunikasi apapun yang memungkinkan seluruh peserta rapat untuk saling mendengar, melihat, dan berbicara antara satu sama lain selama rapat.-----
- 5. Setiap penyelenggaraan RUPS melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat secara tertulis yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.-----
- 6. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham telah diberikan pemberitahuan telebih dahulu secara tertulis mengenai usulan yang bersangkutan dan seluruh pemegang saham telah menyetujui usulan

tersebut dengan menandatangani keputusan edaran secara tertulis. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.---------- D I R E K S I ---------- Pasal 12 -----1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ---terdiri dari dua orang direksi. ------2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Direksi--hanya warga negara Indonesia yang memenuhi ----persyaratan yang ditentukan peraturan perundang---undangan yang berlaku. -----3. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka ---seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat umum Pemegang --Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham ----untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau -lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ---lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan -----memperhatikan ketentuan peraturan perundang----undangan dan Anggaran Dasar. -----6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan ----anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan -diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -oleh rapat Dewan Komisaris. -----7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis --kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) ----hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

8.	Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
	a.mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
	ayat (6);
	b.tidak lagi memenuhi persyaratan perundang
	undangan;
	c.meninggal dunia;
	d.diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
	Umum Pemegang Saham
	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	Pasal 13
1.	Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan d
	luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
	kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dar
	pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan
	segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan
	maupun kepemilikan, untuk:
	a.meminjam atau meminjamkan uang atas nama
	Perseroan ;
	b.mendirikan suatu usaha atau turut serta pada
	perusahaan lain baik di dalam maupun di luar
	negeri;
2.	a.Direktur Utama berhak dan berwenang
	bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
	mewakili Perseroan
	b.Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
	berhalangan karena sebab apapun juga, yang
	tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
	maka salah seorang anggota Direksi lainnya
	berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
	nama Direksi serta mewakili Perseroan
	RAPAT DIREKSI
	Pasal 14
1.	Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan
	setiap waktu apabila dipandang perlu:

- a.oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
- b.atas permintaan tertulis dari seorang atau -----lebih anggota Dewan Komisaris; atau ------
- c.atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ----atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ----mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari
 jumlah seluruh saham dengan hak suara. -------
- 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ---Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar -ini.
- 3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan --surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan -langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ---mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari -sebelum rapat diadakan, dengan tidak
 memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----tanggal, waktu, dan tempat rapat. ------

- 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ------

- berdasarkan surat kuasa. -----
- 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ -----(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir --atau diwakili dalam rapat. -------------------------------
- 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju --berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan ----menentukan. ------
- 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---(satu) suara untuk setiap anggota Direksi ----lain yang diwakilinya. -------

 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap ----tidak ada serta tidak dihitung dalam -----menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12.	Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
	tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
	semua anggota Direksi telah diberitahu secara
	tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
	persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
	tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
	diambil dengan sah dalam Rapat Direksi

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

- 1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih --anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih --dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang
 diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun -dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang --Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ------
- 4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----
 Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling -lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya ----lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum pemegang
 Saham untuk mengisi lowongan itu dengan -----
 memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. ----
 Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
 mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
 memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ---
 tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga ---
 puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. --

5.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -
	a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
	b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
	ayat 5;
	c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang
	undangan yang berlaku;
	d. meninggal dunia;
	e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
	Umum Pemegang Saham
	TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
	Pasal 16
1.	Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
	Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
	tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh
	Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,
	surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan
	mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta
	berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah
	dijalankan oleh Direksi
2.	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
	memberikan penjelasan tentang segala hal yang
	ditanyakan oleh Dewan Komisaris
3.	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan
	sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun
	anggota Direksi maka untuk sementara Dewan
	Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan
	Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk
	Memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau
	lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas
	tanggungan Dewan Komisaris
4.	Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan
	Komisaris, segala tugas dan wewenang yang
	diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota
	Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini

	berlaku pula baginya
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	Pasal 17
Ket	entuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis -
Mut	andis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris
	- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN
	Pasal 18
1.	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
	anggaran tahun tahunan Perseroan kepada Dewan
	Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum
	tahun buku dimulai
2.	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh)
	hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan
	datang;
3.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
	Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)-
	Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,
	buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku
	Perseroan dimulai pada tanggal dari akta
	penyesuaian ini dan ditutup pada tanggal
	31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu
	dua puluh)
4.	Direksi menyusun laporan tahunan dan
	menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat
	diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak
	tanggal panggilan RUPS tahunan
	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
	Pasal 19
1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
	seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba
	rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang
	Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang
	positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang

	ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2.	Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
	menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup
	dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan
	tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba
	rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan
	dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang -
	tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
	itu belum sama sekali tertutup
	PENGGUNAAN CADANGAN
	Pasal 20
1.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan
	sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah
	modal ditempatkan dan disetor hanya boleh
	dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak
	dipenuhi oleh cadangan lain
2.	Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua
	puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat
	Memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi
	keperluan Perseroan
3.	Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
	belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan
	kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada
	ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh -
	Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh
	Direksi dengan cara yang tepat menurut
	pertimbangan Direksi, setelah memperoleh
	persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan
	peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba
	PERATURAN PENUTUP
	Pasal 21
-Se	gala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
	am Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat
Umu	m Pemegang Saham

-Akhi	rnya para penghadap sebagaimana tersebut di atas -
mener	angkan bahwa:
I.	Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan
	disetor penuh dengan uang tunai melalui kas
	Perseroan sejumlah 30 (tigapuluh) lembar saham
	atau seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,-
	(limabelas juta rupiah) oleh para pendiri, yaitu:-
;	a. Nyonya RAFIKA RAHIM,
	tersebut sebanyak 10
	(sepuluh) lembar saham
	atau sebesar (lima juta-
	Rupiah); Rp. 5.000.000,-
1	b. Nona BALQIS AYU MEDITA,-
	tersebut sebanyak 10
	(sepuluh) lembar saham
	atau sebesar (lima juta-
	Rupiah); Rp. 5.000.000,-
•	c. Tuan YUDI IRAWAN,
	tersebut sebanyak 10
	(sepuluh) lembar saham
	atau sebesar (lima juta-
	Rupiah); Rp. 5.000.000,-
i	Sehingga seluruhnya
]	berjumlah 30 (tigapuluh)
	lembar saham, atau sebesar-
	(limabelas juta Rupiah); Rp. 15.000.000
II.	Menyimpang dari ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14
2	Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan
•	anggota Direksi dan Dewan Komisaris, untuk pertama
	kalinya telah diangkat sebagai:
1	DIREKSI :
	-Direktur Utama : Nyonya RAFIKA RAHIM,
	tersebut;
	-Direktur : Nona BALQIS AYU MEDITA,

tersebut;
DEWAN KOMISARIS :
-Komisaris : Tuan YUDI IRAWAN, tersebut;
-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan
-Direksi dan/atau baik secara bersama-sama, maupun
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan-
ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon
pengesahan atas anggaran dasar ini dari instansi yang
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau
penambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan
untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan
dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan
(domisili) dan untuk melaksanakan tindakan lain yang
mungkin diperlukan
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak
pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada
yang dikecualikan yang disampaikan kepada saya, Notaris
maka apabila dikemudian hari sejak ditandatangani ini -
timbul sengketa dalam bentuk apapun yang menyebabkan
oleh akta ini, para penghadap bertangung jawab
sepenuhnya, dengan ini para penghadap menyatakan
membebaskan/melepaskan saya, Notaris dan saksi dari
tuntutan pihak ketiga atau siapapun
DEMIKIANLAH AKTA INI
Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kabupaten
Bogor, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:
1. Nona EVA FAUZIA , lahir di Jakarta, pada tanggal 30-

5-1988 (tiga puluh Mei seribu sembilan ratus delapan

puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Alam Jaya nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun warga 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175047005880002;-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

